

RKT

RENCANA KERJA TAHUN 2022

DINAS PERKEBUNAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Tahun 2022



DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan tahun pertama atau tahun awal dari periode RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang menjadi arah atau pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang perkebunan pada Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dalam proses pembangunan sektor perkebunan merupakan suatu keharusan yang bertujuan untuk memandu pelaksanaan program dan kegiatan yang hasilnya ditunjukkan dengan adanya Indikator Kinerja.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 ini ditujukan untuk mengkonsolidasikan kerjasama dan kemitraan dari semua aktor-aktor ekonomi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sektor agribisnis dan pembangunan lingkungan beserta semua pemangku kepentingan di sektor ini. Lebih lanjut, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 diwarnai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produk agribisnis, kelembagaan agribisnis, dan struktur ekonomi pasar agribisnis, yang merupakan identitas lokal serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar sektor perkebunan.

Semoga Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan referensi, pedoman, evaluasi, penilaian, dan informasi mengenai kegiatan pada sektor perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.

Akhirnya, semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat dan karunia bagi kita sehingga seluruh sasaran yang telah dirumuskan dapat dicapai, Amin.

Tenggarong, 31 Agustus 2021

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Ir. H. Muhammad Taufik
Pembina Utama Muda
NIP. 19670625 199203 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	Hal. i
Daftar Isi	Hal. iii
Bab I. Pendahuluan	Hal. 1
1.1. Latar Belakang	Hal. 1
1.2. Landasan Hukum.....	Hal. 1
1.3. Maksud dan Tujuan	Hal. 2
1.4. Sistematika Penulisan	Hal. 3
Bab II. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Hal. 4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	Hal. 4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Hal. 7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Hal. 8
Bab III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	Hal. 11
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	Hal. 11
3.2. Tujuan dan Sasaran RKT Perangkat Daerah	Hal. 13
Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	Hal. 14
4.1 Program dan Kegiatan	Hal. 14
Bab V. Penutup	Hal. 20

BAB 1. P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Urusan Perkebunan pada dasarnya berbasiskan sumberdaya domestik yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) . Selain itu Sub Sektor Perkebunan tidak saja memberikan kontribusi yang berarti bagi Pembangunan secara umum maupun Devisa Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk di pedesaan.

Memperhatikan peranan sub sektor Perkebunan, tantangan dan peluang yang dihadapi serta tuntutan pembangunan yang semakin transparan pada era otonomi daerah saat ini, maka arah pengembangan sub sektor Perkebunan lima tahun ke depan adalah menumbuhkan dan mengembangkan agribisnis untuk mewujudkan perkebunan yang tangguh menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam, Sosial Budaya dan Teknologi yang berwawasan lingkungan untuk mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan pasar dunia, mengingat produk-produk perkebunan yang dihasilkan sebagian besar untuk tujuan ekspor.

Peranan lebih nyata dalam kondisi krisis dimana sektor lainnya mengalami kesulitan untuk berkembang, sub sektor perkebunan menjadi salah satu andalan dalam mendukung kesinambungan pembangunan nasional dan daerah termasuk penanganan permasalahan jangka pendek seperti pencukupan kebutuhan pangan, penyediaan lapangan kerja serta perolehan dan penghematan devisa melalui kegiatan ekspor. Secara nasional sub sektor perkebunan juga telah memberikan kontribusi dalam menekan kesenjangan struktural dan spasial melalui peningkatan pendapatan petani dan penyebaran sentra produksi perkebunan, membuka peluang pengembangan agroindustri dan menyediakan bahan baku industri dalam negeri, mendukung pertumbuhan wilayah dan sektor lainnya, serta mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka kebijaksanaan pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Perubahan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada terciptanya kondisi yang kondusif untuk tumbuh, berkembang dan berdayanya sistem perekonomian yang memberikan peluang bagi segenap pelaku ekonomi secara proporsional yang terkait secara fungsional sehingga membentuk kekuatan ekonomi wilayah yang sinergis dengan sektor lainnya.

Mengacu pada kenyataan tersebut, maka diperlukan beberapa program pembangunan perkebunan diantaranya peningkatan kuantitas dan kualitas komoditas andalan/unggulan daerah yang dilakukan antara lain dengan menata berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kawasan andalan yang dikaitkan dengan program pengembangan agroindustri dan agribisnis. Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi wilayah, sebab mempunyai peluang untuk tidak lagi memasarkan hasil komoditas perkebunan dalam bentuk bahan mentah, tetapi telah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Sehingga harganya tidak terlalu peka terhadap fluktuasi harga komoditas dipasaran dunia. Disamping itu secara langsung akan memperbaiki struktur ekonomi daerah yang diharapkan akan mampu menunjang peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut maka perlu disusun adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang terarah, transparan, partisipatif, terpadu dan akuntabel.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varitas Tanaman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Penyusunan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
21. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor 251/Kpts/RC.020/7/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
27. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan;
28. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-197/Bapp/IV.2/065.II/02/2021 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2022;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah :

1. Membuat rumusan-rumusan perencanaan pembangunan perkebunan secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan.
2. Membuat dan menetapkan indikator-indikator Pengukuran capaian tujuan dan sasaran kinerja OPD.
3. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sektor Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sebagai arah pembangunan perkebunan yang ingin dicapai dalam kurun 5 tahun yang disusun berdasarkan tupoksi penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah.
5. Memprediksi kebutuhan yang diperlukan dalam membangun perkebunan selama 1 tahun mendatang.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai pedoman melaksanakan pembangunan perkebunan bagi jajaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk satu tahun ke depan. Menjamin agar pelaksanaan pembangunan perkebunan dapat berjalan efisien, efektif dan produktif.
2. Mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan untuk menciptakan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan.
3. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi pembangunan perkebunan selama 1 tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen RKT Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan;
 Bab ini memuat latar belakang perlunya RKT landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja.
- BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 Dalam bab ini memuat perlunya dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, juga analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra Perangkat Daerah.
- BAB III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah;
 Dalam Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan apa tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
- BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 Dalam Bab ini memuat Program dan Kegiatan
- BAB V. Penutup;

BAB 2. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Usulan anggaran pada RENJA (Rencana Kerja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 sebesar Rp. 19.667.057.000,-, yang terdiri dari 56 kegiatan dalam 9 program. Dimana alokasi anggaran yang terakomodir pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 bertambah menjadi sebesar Rp. 27.233.303.040,-, yang terdiri dari 58 kegiatan dalam 8 program. Sedangkan pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 alokasi anggaran berkurang menjadi Rp. 24.234.095.504,-, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan bertambah menjadi 59 kegiatan dalam 9 program, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.580.022.604,- atau 89,00% sedangkan realisasi fisik sebesar 96,65%.

Dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang disusun pada tahun 2019, terdapat 5 (lima) program yang tidak lagi dilaksanakan mulai tahun 2020, yaitu :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan
2. Peningkatan Kesejahteraan Pekebun
3. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan
4. Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan
5. Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan

Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 didukung oleh 9 (sembilan) program, dimana terdapat program yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target dan melebihi target, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

No	Program	Indikator		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Perluasan Komoditas Perkebunan	1) Luas Areal Komoditi Perkebunan (Ha)	1) Sawit :			
			- Rakyat :	28.410	28.322	99,69
			- PBS :	192.820	190.400	98,74
			2) Karet :			
			- Rakyat :	18.960	17.996	94,91
			- PBS :	4.479	2.930	65,41
			3) Lada :	4.909	3.720	75,77
			4) Kelapa :	8.484	7.311	86,17
			5) Kopi :	664	70	10,54
			6) Kakao :	153	71	46,57
			7) Aren :	373	247	66,14
		2) Jumlah Petani Pekebun (KK)	Rakyat :	31.439	29.057	92,42
			Plasma :	16.905	17.449	103,22

No	Program	Indikator		Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Peningkatan Produksi Perkebunan	1) Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	1) Sawit :			
			- Rakyat :	290.000	248.311	85,62
			- PBS :	1.956.894	2.628.288	134,31
			2) Karet :			
			- Rakyat :	12.400	9.035	72,86
			- PBS :	741	2.638	355,94
			3) Lada :	4.170	1.832	43,93
			4) Kelapa :	5.800	2.908	50,14
			5) Kopi :	33	5	15,97
			6) Kakao :	56	30	53,16
			7) Aren :	588	396	67,40
		2) PAD Kebun Dinas Perkebunan	Jumlah PAD Kebun Dinas Perkebunan	Rp. 415.000.000,-	Rp. 148.050.000,-	35,67

2. Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	80%	80%	100,00
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Teguran Disiplin ASN Dinas Perkebunan	0 Surat Peringatan	0 Surat Peringatan	100,00
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nila SKP Seluruh ASN Dinas Perkebunan	87%	87%	100,00
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, serta Data dan Informasi	1) Tingkat Konsistensi Renja Dan Renstra Dinas Perkebunan	95%	95%	100,00
		2) Persentase Penyelesaian Temuan Audit	100%	100%	100,00
		3) Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	100%	100%	100,00
6	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan	12 Pekebun	12 Pekebun	100,00

3. Realisasi program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

No	Program	Indikator		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Harga Pasar Komoditi Perkebunan (Rp.)	1) Sawit :			
			- Rakyat :	1.050	1.125	107,13
			- PBS :	1.600	1.632	102,00
			2) Karet :	7.050	6.673	94,66
			3) Lada :	100.000	37.350	37,35
			4) Kelapa :	4.500	3.144	69,88
			5) Kopi :	26.000	30.200	116,15
			6) Kakao :	23.000	28.673	124,66
			7) Aren :	20.000	23.000	115,00

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program :

Faktor penyebab target program yang tidak tercapai target kinerjanya antara lain dikarenakan adanya faktor eksternal dari organisasi antara lain adanya alih fungsi lahan komoditas perkebunan, gangguan OPT endemis tanaman perkebunan dan terbatasnya kuota pupuk subsidi serta lemahnya daya beli pekebun terhadap pupuk non subsidi yang mengakibatkan menurunnya produksi beberapa komoditas perkebunan.

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja, penetapan anggaran kas sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan.

Sedangkan faktor penyebab target program melebihi target kinerja program adalah membaiknya harga pasar beberapa komoditas perkebunan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2020 implikasi yang timbul adalah diperlukannya : (1) Penetapan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai antisipasi alih fungsi lahan komoditas perkebunan, (2) Pengendalian serangan OPT perlu dilakukan secara cepat sehingga kerusakan yang ditimbulkannya dapat dikurangi, dan (3) Penambahan kuota pupuk subsidi komoditas perkebunan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

1. Penyediaan reviw rencana aksi pengembangan komoditas unggulan dan andalan perkebunan berbasis kawasan dan korporasi.
2. Pengembangan dan intensifikasi tanaman perkebunan yang dititikberatkan pada komoditas unggulan dan andalan berbasis Kawasan secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, penyiapan petani unggul dan dukungan sarana, prasarana dan infratsruktur wilayah.
3. Peningkatan perlindungan tanaman serta penanggulangan bencana dan gangguan usaha perkebunan.
4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha perkebunan.
5. Peningkatan penyuluhan perkebunan dan pengembangan pekebun milenia.
6. Pengembangan kemitraan usaha perkebunan yang produktif dan sehat dan pengolahan hasil perkebunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran dan Indikator Sasaran pada Perubahan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 s/d 2021 yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) Sasaran dan Indikator Sasaran, yaitu :

- 1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
Indikator Sasaran : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan
- 2. Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan
Indikator Sasaran : Persentase Penurunan Pekebun Miskin
- 3. Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan
Indikator Sasaran : Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan

Adapun target dan capaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah ini :

Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan			Nilai LKjIP : 65 (B)	Nilai LKjIP : 68 (B)	Nilai LKjIP : 72 (BB)	Nilai LKjIP : 76 (BB)	Nilai LKjIP : 81 (A)	Nilai LKjIP : 67 (B)	Nilai LKjIP : 69 (B)	Nilai LKjIP : 79,54 (BB)	Nilai LKjIP : 77,00 (BB)	Nilai LKjIP : 77,00 (BB)	
2	Persentase Penurunan Pekebun Miskin			0%	0%	5%	5%	5%	0%	0%	0%	5%	5%	
3	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan			8,68%	9,03%	9,39%	9,76%	10,15%	8,68%	6,53%	7,04%	7,00%	7,00%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sampai pada tahun 2020 yaitu pelaksanaan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara Tahun 2016-2021, pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara pada umumnya dapat berjalan lancar sesuai sesuai dengan yang diharapkan. Namun masih ditemukan adanya kegiatan-kegiatan pada masing–masing bidang bidang yang belum sempurna dan belum sesuai dengan harapan.

Berikut Isu-isu strategis pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara pada tahun 2022 :

- 1. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan andalan perkebunan
- 2. Optimalisasi pemanfaatan lahan perkebunan
- 3. Penguatan kelembagaan, kemitraan dan peningkatan mutu dan nilai tambah produk perkebunan

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara

Beberapa permasalahan yang masih terjadi pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

No	Permasalahan	Penyebab Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya produksi perkebunan dan terjadinya penurunan produksi dari beberapa komoditas unggulan perkebunan	1. Produktivitas tanaman perkebunan masih rendah	1 Terbatasnya kuota pupuk subsidi dan lemahnya daya beli pekebun terhadap pupuk non subsidi
			2 Penggunaan bibit yang tidak unggul/tidak bersertifikasi oleh pekebun
			3 Masih lemahnya penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan
			4 Tanaman yang usianya sudah di atas 25 tahun (karet)
			5 Gangguan OPT Endemis
			6 Masih kurangnya ketersediaan mesin dan peralatan budidaya dan panen
			7 Tidak memadainya prasarana irigasi pada areal perkebunan, khususnya tanaman kelapa dan lada (pintu air, embung)
			8 Pendangkalan pada saluran parit di kebun kelapa dalam
			9 Kualitas jalan produksi perkebunan belum memadai
			10 Berkurangnya luas areal dan luas tanaman menghasilkan (TM), terutama pada tanaman kelapa dalam, lada, kopi dan kakao
			11 Banyaknya lahan fungsional tanaman perkebunan yang dialih fungsikan dan alih komoditas
2.	Pendapatan/kesejahteraan pekebun masih rendah	2. Pemanfaatan lahan oleh perusahaan perkebunan belum optimal. Luas lahan IUP sebesar 678.980 ha, sementara lahan yang telah dimanfaatkan untuk kebun inti dan plasma sebesar 196.794 ha. (28,98 %)	1 Adanya lahan yang tertumpang tindih dengan perijinan usaha lainnya
			2 Kurangnya ketaatan perusahaan perkebunan dalam melaksanakan ketentuan perizinan
		1. Harga komoditi perkebunan fluktuatif dan belum memberikan keuntungan yang wajar bagi pekebun	3 Terdapat bagian dari lahan yang diberikan izin kondisinya tidak dapat ditanami
			1 Kurangnya baiknya penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil komoditas perkebunan
			2 Mutu produk yang masih rendah
			3 Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pekebun dalam aspek panen, pasca panen dan pengolahan hasil

No	Permasalahan	Penyebab Masalah	Akar Masalah
			4 Masih rendahnya kesadaran pekebun untuk berperan aktif dalam penguatan kelembagaan kemitraan, pengolahan hasil dan pemaasaran
			5 Masih tingginya ketergantungan penjualan hasil pada pengepul (masih kurangnya akses kemitraan pemasaran komoditi perkebunan)
			6 Masih kurangnya ketersediaan sarana penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
			7 Belum berkembangnya dengan baik industri hilir pengolahan lada
		2. Skala usaha yang masih rendah	Keterbatasan modal pekebun untuk kepemilikan lahan yang lebih luas

2.3.2 Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara

Beberapa peluang yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara pada tahun 2022 yang merupakan tahun pertama periode Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026, antara lain :

- 1) Tersedianya kompetensi tenaga kerja
- 2) Tingginya minat masyarakat terhadap komoditi perkebunan
- 3) Kondusifnya iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan
- 4) Kemajuan teknologi pengolahan produk perkebunan
- 5) Selarasnya kebijakan antara pusat dan daerah di bidang perkebunan

2.3.3 Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara

Beberapa tantangan yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara pada tahun 2022 yang merupakan tahun pertama periode Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026, antara lain :

- 1) Persaingan kualitas produk perkebunan
- 2) Kondisi infrastruktur kurang menunjang
- 3) Implementasi tata ruang secara nasional belum terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan
- 4) Perubahan cuaca/iklim sebagai imbas dari global warning
- 5) Aksesibilitas ke kawasan perkebunan masih terbatas

2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara maka dirumuskanlah beberapa program dan kegiatan prioritas pada tahun 2022, perumusan program dan kegiatan ini juga guna mendukung tema yang telah ditentukan dalam RKPD Kabupaten Kartanegara tahun 2022 yaitu : “MEMPERKUAT LANDASAN BAGI PERCEPATAN (AKSELERASI) DAN PEMBAHARUAN (TRANSFORMASI) PEMBANGUNAN BERBASIS POTENSI KEWILAYAHAN DAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH”.

Adapun Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah :

Focus	Sasaran	Indikator	Data Awal	Target 2022	Prognosis 2023
EKONOMI UNGGULAN DAERAH	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,21	5,69	6,15

Sedangkan Sasaran, Prioritas, Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah :

Sasaran	Prioritas 2022	Arah Kebijakan Pembangunan 2022	Program Prioritas Pembangunan 2022
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Program Perizinan Usaha Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan lingkup dipersempit dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang harus selaras dan sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024. Hal ini berarti bahwa konteks Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tidak boleh keluar dari koridor Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah :

“PERKEBUNAN INDONESIA YANG PRODUKTIF, BERNILAI TAMBAH DAN BERDAYA SAING DALAM MEWUJUDKAN PERTANIAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG UNTUK MENDUKUNG TERCAPAINYA VISI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA”.

Visi Direktorat Jenderal Perkebunan diatas pada dasarnya adalah mewujudkan perkebunan Indonesia yang memenuhi 3 (tiga) kata kondisi utama, yaitu produktif, bernilai tambah dan berdaya saing. Makna ketiga kondisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Produktif, berarti bahwa produksi komoditas perkebunan Indonesia semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun dalam memenuhi kebutuhan ekspor. Peningkatan produksi tentunya dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas maupun luas panen tanaman perkebunan nasional.
2. Bernilai tambah berarti bahwa produk perkebunan Indonesia mampu dihilirisasi, tidak menjual bahan mentah, dan mampu menyajikan produk olahan perkebunan yang mampu meningkatkan harga jual komoditas perkebunan nasional. Peningkatan harga jual ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar perkebunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun nasional.
3. Berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional mampu bersaing dengan produk impor sejenis maupun produk ekspor sejenis dari negara lain. Dalam konteks impor, jika produk perkebunan nasional berdaya saing, maka jumlah impor produk perkebunan dapat diturunkan baik melalui produk sejenis maupun produk substitut sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan dalam konteks ekspor, berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional menjadi pilihan utama negara tujuan ekspor dibanding dengan produk perkebunan sejenis yang dimiliki negara lain.

Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 berdasarkan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah : “MENINGKATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN ASAL PERKEBUNAN SERTA KEBUTUHAN EKSPOR KOMODITAS PERKEBUNAN DALAM MEMPERKUAT STUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING”.

Misi ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan akan fokus dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri serta pemenuhan kebutuhan ekspor luar negeri, dimana Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan ekspor pertanian secara keseluruhan. Hal ini dilakukan guna memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing sesuai Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024.

Tujuan merupakan penjabaran lebih detil dari visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Visi Direktorat Jenderal tahun 2024. Tujuan Direktorat Jenderal perkebunan tahun 2024 adalah “Terwujudnya Produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai kepentingan penguatan ekonomi nasional”. Tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu :

1. Pertumbuhan ekspor produk perkebunan nasional (%)
2. Penurunan impor produk perkebunan nasional (%)
3. Nilai reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan menuju birokrasi yang efektif dan efisien

Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output). Perumusan sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan penerjemahan dari tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan dan pendelegasian dari Kementerian Pertanian. Selain itu, sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan juga merupakan hasil pendelegasian kinerja dari sasaran strategis Kementerian Pertanian, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Perkebunan. Sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan
2. Tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan
3. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan
4. Terselenggaranya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien
5. Terselenggaranya pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas
6. Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan

Direktorat Jenderal Perkebunan berupaya untuk mencapai 2 (dua) hasil akhir sebagai bagian kontribusi atas pembangunan pertanian nasional, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan yang semakin meningkat serta ekspor produk perkebunan yang semakin meningkat. Kedua hal tersebut akan terwujud apabila produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing dapat terwujud sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional. Terwujudnya atap strategi berupa produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing tersebut tidak lepas dari peran penting keempat pilar strategis Direktorat Jenderal Perkebunan yang saling bersinergi dan terintegrasi.

Pilar pertama adalah perbenihan tanaman perkebunan, dimana diharapkan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dapat terwujud. Ketersediaan dan kualitas benih yang memadai akan sangat mempengaruhi produksi tanaman perkebunan.

Pilar kedua adalah budidaya tanaman perkebunan, dimana efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan best practice budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan Good Agricultural Practice (GAP).

Pilar ketiga adalah pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut.

Pilar keempat adalah jaminan mutu, dimana peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan menjadi hal penting yang harus diwujudkan. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

Berdasarkan arahan strategis Direktur Jenderal Perkebunan dan hasil focus group discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan, maka dirumuskan sejumlah kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024. Kegiatan merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi Presiden pada sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, dimana kegiatan yang disusun harus selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 :

1. Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman
2. Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan
3. Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan
4. Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT sertaantisipasi risiko DPI
5. Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan
6. Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu satu tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan Dinas Perkebunan merupakan sebuah upaya dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022. Tujuan Rencana Kerja ini ditetapkan untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang.

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perkebunan setiap tahunnya sesuai dengan penjabaran dari tujuan Rencana Kerja. Dari keempat tujuan Rencana Kerja Dinas Perkebunan, dapat dirumuskan turunan tujuan berupa sasaran-sasaran perencanaan pembangunan perkebunan yang efektif dan efisien serta memiliki indikator yang spesifik, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2022 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan Dan Sasaran Tahun 2022
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan		Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persen	7,20
		1.Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan dan Andalan Perkebunan	1 Produksi Kelapa Sawit Rakyat	Ton	267.635
			2 Produksi Kelapa Sawit PBS	Ton	2.924.513
			3 Produksi Karet	Ton	9.238
			4 Produksi Lada	Ton	1.815
			5 Produksi Kelapa Dalam	Ton	2.510
			6 Produksi Kopi	Ton	8
			7 Produksi Kakao	Ton	34
			8 Produksi Aren	Ton	392
			9 Produksi Kakao	Ton	6
		2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan dan Andalan Perkebunan	1 Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat	Kg/Ha	14.067
			2 Produktivitas Kelapa Sawit PBS	Kg/Ha	17.130
			3 Produktivitas Karet	Kg/Ha	943
			4 Produktivitas Lada	Kg/Ha	639
			5 Produktivitas Kelapa Dalam	Kg/Ha	441
			6 Produktivitas Kopi	Kg/Ha	311
			7 Produktivitas Kakao	Kg/Ha	681
			8 Produktivitas Aren	Kg/Ha	2.658
			9 Produktivitas Kakao	Kg/Ha	1.233
		3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun	NTP Perkebunan	Persen	98

BAB 4. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 s/d 2026. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 s/d 2026 merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik dinas sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat. Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2022 direncanakan berjumlah 6 Program, 15 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 37.257.507.862,-

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Tahun 2022, secara rinci dapat dilihat pada Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah ini :

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Paqu	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Paqu
	NON URUSAN (GENERIK)				28.167.507.862		29.090.757.862
3.27.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		77,50	28.167.507.862	78,00	29.090.757.862
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9 Dokumen	640.274.000	9 Dokumen	640.274.000
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	3 Dokumen (Renja, RKA/DPA, Verifikasi Calon Penerima Bantuan)	320.898.000	3 Dokumen (Renja, RKA/DPA, Verifikasi Calon Penerima Bantuan)	320.898.000
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perkebunan	2 Laporan (Laporan Keuangan dan SPIP)	84.000.000	2 Laporan (Laporan Keuangan dan SPIP)	84.000.000
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	4 Dokumen (Statistik, LKjIP/ LPPD, Panji Perkebunan, PDRB Perkebunan)	235.376.000	4 Dokumen (Statistik, LKjIP/ LPPD, Panji Perkebunan, PDRB Perkebunan)	235.376.000
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		15 Laporan	23.542.202.184	15 Laporan	24.126.073.862

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Paqu	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Paqu
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perkebunan	12 bulan	23.314.082.184	12 bulan	23.897.953.862
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Perkebunan	15 Laporan	228.120.000	15 Laporan	228.120.000
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		1 Dokumen	121.400.000	1 Dokumen	131.660.000
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Dinas Perkebunan	1 Laporan	81.660.000	1 Laporan	81.660.000
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Kab. Kukar	1 Laporan	39.740.000	1 Laporan	50.000.000
3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
3.27.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Hasil Penjualan Tanaman Perkebunan	Dinas Perkebunan	Rp. 1.062.149.500,-	25.000.000	Rp. 337.500.000,-	25.000.000
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		2 Dokumen	253.736.200	2 Dokumen	270.000.000
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan luar daerah	21 Orang	183.736.200	25 Orang	200.000.000
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Dinas Perkebunan	15 Orang	70.000.000	15 Orang	70.000.000
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7 Layanan	1.066.974.438	7 Layanan	1.209.500.000
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Dinas Perkebunan	7 Jenis	10.000.000	7 Jenis	10.000.000
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Perkebunan	35 Jenis	300.000.000	35 Jenis	350.000.000
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Dinas Perkebunan	10 Jenis	126.634.438	20 Jenis	130.000.000
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Dinas Perkebunan	3 Jenis	55.020.000	5 Jenis	65.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Paqu	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Paqu
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	Dinas Perkebunan	3.600 Eksemplar	29.820.000	5.400 Eksemplar	54.500.000
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Dalam dan luar daerah	460 Orang/Hari	445.500.000	500 Orang/Hari	500.000.000
3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	Dinas Perkebunan	1.352 Berkas	100.000.000	1.352 Berkas	100.000.000
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang		12 Bulan	1.947.256.980	12 Bulan	1.988.250.000
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perkebunan	12 Bulan	349.006.972	12 Bulan	380.000.000
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perkebunan	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	90.000.000
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	Dinas Perkebunan	1. 12 Bulan	1.518.250.008	1. 12 Bulan	1.518.250.000
		2. Jumlah pameran yang diikuti		2. 2 Kali		2. 2 Kali	
		3. Jumlah pengelolaan Website		3. 1 Kegiatan		3. 1 Kegiatan	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah		104 Unit	570.664.060	130 Unit	700.000.000
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Dinas Perkebunan	103 Unit Roda 4 & Roda 2	400.000.000	127 Unit Roda 4 & Roda 2	400.000.000
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas Perkebunan	1 Unit	170.664.060	3 Unit	300.000.000
3.27	URUSAN PERTANIAN				9.090.000.000		7.289.750.000
3.27.02	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat (Ha)		28.570	4.425.000.000	28.645	3.892.250.000
		2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS (Ha)		214.116		237.435	
		3. Luas Areal Karet (Ha)		17.898		17.928	
		4. Luas Areal Lada (Ha)		3.402		3.412	
		5. Luas Areal Kelapa Dalam (Ha)		7.286		7.291	
		6. Luas Areal Kopi (Ha)		78		89	
		7. Luas Areal Kakao (Ha)		80		85	
		8. Luas Areal Aren (Ha)		237		243	
		9. Luas Areal Kelor (Ha)		5		7	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Paqu	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Paqu
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian		408 Unit	4.175.000.000	281 Unit	3.592.250.000
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Luas pengadaan bibit & herbisida	1) Kota Bangun : Kakao 5 Ha 2) Tabang : Kakao : 5 Ha 3) Loa Kulu : Kelor 3 Ha	13 Ha	602.000.000	22 Ha	706.500.000
		Luas pengadaan pupuk	1) Kembang Janggut : Sawit 20 Ha 2) Marangkayu : Karet 60 Ha & Sawit 55 Ha 3) Muara Wis : Karet 10 Ha 4) Loa Kulu : Karet 10 Ha 5) Samboja : Kelapa 15 Ha 6) Anggana : Sawit 15 Ha 7) Tenggarong Shr : Karet 10 Ha	235 Ha	1.226.250.000	181 Ha	889.000.000
		Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen	1) Sanga-sanga : Karet 20 Unit 2) Samboja : Kelapa 40 Unit	60 Unit	300.000.000	1 Unit	200.000.000
		Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan	Sanga-Sanga : 3 Orang, Marang Kayu : 60 Orang, Samboja : 6 Orang, Kembang Janggut : 9 Orang, Muara Muntai : 2 Orang, Sebulu : 10 Orang, Muara Jawa : 8 Orang,	100 Orang	1.400.000.000	77 Orang	1.200.000.000
		Luas pemeliharaan Kebun Dinas	1. Tenggarong 2. Loa Kulu 3. Kembang Janggut	19 Ha	100.000.000	19 Ha	100.000.000
		Jumlah pengadaan benih	1. Kembang Janggut 2. Tenggarong	5.000 Benih	396.750.000	5.000 Benih	396.750.000
		Luas Demfarm Tanaman Perkebunan	1. Tenggarong 2. Loa Kulu 3. Kembang Janggut	2 Ha (Kelor, Kopi Dan Kakao)	150.000.000	2 Ha (Kelor, Kopi Dan Kakao)	100.000.000
3.27.02.2.01	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Kegiatan	250.000.000	2 Kegiatan	300.000.000
3.27.02.2.01.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Fasilitas Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	8 Kecamatan	1 Kegiatan	125.000.000	1 Kegiatan	150.000.000
3.27.02.2.01.02	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Fasilitas Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	8 Kecamatan	1 Kegiatan	125.000.000	1 Kegiatan	150.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu
3.27.03	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun		3.600 Meter	3.315.000.000	3.600 Meter	2.147.500.000
		2. Jumlah Embung Yang Dibangun		3 Unit		4 Unit	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana PertanianYang Dikembangkan		2 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	150.000.000
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	18 Kecamatan	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Lahan	18 Kecamatan	1 Dokumen	200.000.000		
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana PertanianYang Dibangun		20 Unit	2.965.000.000	21 Unit	1.997.500.000
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Yang Dibangun (Program Dedikasi)	Sebulu, Loa Janan & Muara Muntai	3 Unit	1.500.000.000	2 Unit	1.000.000.000
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun (Program Dedikasi)	Kembang Janggut, Anggana, Muara Badak & Tenggarong	1.600 Meter	1.180.000.000	1.600 Meter	960.000.000
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Kebun Yang Direhabilitasi	1. Muara Jawa 2. Samboja	17 Unit	285.000.000	2 Unit	37.500.000
3.27.05	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan		86,67%	450.000.000	72,00%	450.000.000
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan		200 Ha	450.000.000	220 Ha	450.000.000
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas pengendalian OPT Perkebunan	18 Kecamatan	60 Ha	150.000.000	110 Ha	150.000.000
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura,	Luas Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ANKT) dalam areal IUP Perkebunan yang dikelola	18 Kecamatan	22.050 Ha	150.000.000	22.650 Ha	150.000.000
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1. Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	18 Kecamatan	10 Kelompok	150.000.000	15 Kelompok	150.000.000
		2. Jumlah Gangguan Usaha Perkebunan yang difasilitasi		10 Kasus		10 Kasus	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Paqu	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Paqu
3.27.06	Perizinan Usaha Pertanian	1) Jumlah Penerbitan STDB		200 Surat (STDB)	400.000.000	200 Surat (STDB)	250.000.000
		2) Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)		11 Surat (PUP)		3 Surat (PUP)	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina		211 Pelaku	400.000.000	203 Pelaku	250.000.000
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1) Jumlah pekebun yang mendapatkan STDB	18 Kecamatan	200 Surat (STDB)	400.000.000	200 Surat (STDB)	250.000.000
		2) Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)		11 Surat (PUP)		3 Surat (PUP)	
3.27.07	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok		4,77%	500.000.000	9,76%	550.000.000
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina		47 Lembaga	500.000.000	52 Lembaga	550.000.000
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1) Jumlah Kelompok Tani yang dibina	18 Kecamatan	45 Kelompok Tani & Pelaksanaan	350.000.000	47 Kelompok Tani	400.000.000
		2) Jumlah Pekebun Milenial yang dibina		10 Pekebun Milenial		20 Pekebun Milenial	
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Lembaga Pekebun yang Dibentuk/Bermitra	1. Samboja (Kelapa) 2. Loa Kulu (Kopi)	2 Lembaga	150.000.000	2 Lembaga	150.000.000
Total					37.257.507.862		36.380.507.862

BAB 5. P E N U T U P

5.1 Catatan Penting

Dengan adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini selanjutnya digunakan sebagai landasan operasional dimana isinya lebih memusatkan pada tujuan, sasaran jangka pendek.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini telah disusun dengan melibatkan hampir seluruh stakeholder yang terkait dengan sub sektor perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga diharapkan pelaksanaan dari seluruh rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara baik oleh semua pihak yang terkait, baik unsur internal yaitu semua bidang dalam lingkup Dinas, Sekretariat maupun Kelompok Jabatan Fungsional.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini adalah merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam langkah dan gerak pelaksanaan tugas dari aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sehubungan hal tersebut maka ditetapkan beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan Renja yang telah disusun sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 harus dilaksanakan secara konsisten dan terpadu melalui kerjasama pihak yang berfungsi sebagai manajerial yaitu Sekretariat dan pihak yang mengemban proses utama kegiatan yaitu semua bidang dalam lingkup Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah perencanaan yang bersifat top down dan bottom up planning sehingga dalam pelaksanaannya keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan khususnya pelaku usaha sub sektor perkebunan baik petani, lembaga petani, pengusaha sub sektor perkebunan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
3. Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan yang didalamnya telah berisi sinkronisasi dan sinergitas dari semua perencanaan yang menjadi dokumen acuan baik RKPD, RPJMD, RPJPD, RPJMN dan RPJPN.
4. Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini merupakan pelaksanaan dari Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-197/Bapp/IV.2/065.II/02/2021 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2022.
5. Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Implementasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan membutuhkan manajemen yang baik dalam pelaksanaannya. Kegiatan manajerial tersebut meliputi pengorganisasian (organizing), Pelaksanaan itu sendiri (actuating) dan evaluasi (controlling), berdasarkan hal tersebut maka perlu dirumuskan Rencana Tindak Lanjut dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, antara lain :

1. Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 akan dilaksanakan dengan keterlibatan semua elemen dalam Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (internal) dan elemen di luar Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, keterlibatan elemen internal tersebut Sekretariat, Bidang Pengembangan dan Perbenihan, Bidang Produksi, Bidang Usaha dan Penyuluhan, Bidang Perlindungan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat akan melakukan pengorganisasian (organizing) dan Evaluasi (controlling) dalam pelaksanaan dokumen renja yang telah ditetapkan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai
3. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan khususnya pelayanan pada pelaku usaha perkebunan baik petani, lembaga petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani) maupun sektor privat yang bergerak pada sub sektor perkebunan.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara) Tahun 2022.

Tenggarong, 31 Agustus 2021

KepalaPerkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Kutai Kartanegara Perkebunan Office. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA' around the perimeter and 'DINAS PERKEBUNAN' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670625 199203 1
007